



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura*

*Telp. (0363) 21037*

## KATA PENGANTAR

Atas *asung kertawara* nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas rahmat-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per-31 Desember 2014. Pembuatan laporan keuangan ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengamanatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, dan mengingat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP 24 Tahun 2004. Selanjutnya dalam hal penyajian laporan keuangan antara lain memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya penyusunan laporan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Amlapura, 26 Februari 2014  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karangasem,

**Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M**  
NIP. 19630929 198903 1 016

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas dari salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Amlapura, 26 Februari 2014  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karangasem,

Ir. Gde Ngurah Yudiantara, M.M  
NIP. 19630929 198903 1 016

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggungjawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>Bab I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (neraca SKPD) .....	2
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (neraca SKPD) .....	3
<b>Bab II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kebijakan Keuangan .....	5
2.1.1 Belanja Daerah .....	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja .....	5
2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya.....	5
2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya .....	6
<b>Bab III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	10
3.1.1 Perbandingan Realisasi Antar Periode .....	10
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target .....	11
<b>Bab IV. KEBIJAKAN AKUNTASI .....</b>	<b>12</b>
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan SKPD .....	12
4.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran .....	12
4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok .....	13
4.3.1 Pendapatan .....	13
4.3.2 Belanja .....	14
4.3.3 Pembiayaan .....	15
4.3.4 Aset/Aktiva .....	16
4.3.5 Kewajiban.....	20
4.3.6 Ekuitas Dana .....	21
4.3.7 Kebijakan Khusus Untuk Aset Tetap .....	22

<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>24</b>
5.1 Penjelasan Pos Belanja.....	24
5.1.1 Belanja Operasional .....	24
5.2 Penjelasan Pos Aset .....	25
5.2.1 Aset Lancar .....	25
5.2.1.1 Kas di Kas Daerah .....	25
5.2.1.2 Kas di Kas SKPD.....	25
5.2.2 Aset Tetap.....	25
5.2.2.1 Tanah .....	26
5.2.2.2 Peralatan dan Mesin.....	26
5.2.2.3 Gedung dan Bangunan .....	26
5.2.2.4 Akumulasi Penyusutan .....	26
5.2.3 Aset Lainnya.....	26
5.2.3.1 Aset Lain-Lain .....	26
5.3 Penjelasan Pos Kewajiban .....	27
5.3.1 Biaya Yang Masih Harus Dibayar/Dana Titipan .....	27
5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana .....	27
5.4.1 Ekuitas Dana Investasi .....	27
5.4.1.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap .....	27
5.4.1.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.....	27
 <b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>28</b>
6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
6.1.1 Kedudukan .....	28
6.1.2 Struktur Organisasi.....	28
6.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
6.1.4 Visi .....	30
6.1.5 Misi.....	30
 <b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
7.1 Simpulan .....	31
7.2 Saran .....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : LRA 2014
- Lampiran 2 : Neraca per 31 Desember 2014
- Lampiran 3 : Daftar Aset s/d Desember 2014

*Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem  
Tahun 2014*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/316/BAKD Tahun 2007. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk:

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD**

Penyusunan laporan keuangan (Neraca) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Neraca) SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Neraca disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala pencapaian target

### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok

### **Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Pos Belanja
- 5.2 Penjelasan Pos Aset
- 5.3 Penjelasan Pos Kewajiban
- 5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana
- 5.5 Informasi Lain
- 5.6 Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerangan basis akrual atas pendapatan dan belanja

### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan**

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Kebijakan Keuangan**

Arah kebijakan penyusunan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014 diarahkan untuk memantapkan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi unit kerja. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014, diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Belanja Daerah**

Penetapan belanja SKPD tahun 2014 diarahkan pada tujuan yaitu:

- ✓ Meningkatnya fungsi lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan peningkatan kecerdasan masyarakat.
- ✓ Meningkatnya kinerja birokrasi yang didukung aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur untuk mendukung terciptanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- ✓ Meningkatnya potensi telekomunikasi yang diwujudkan dengan pemerataan jaringan komunikasi pada setiap wilayah dan area *blankspot* serta tersedianya layanan pos perdesaan.

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal, dengan melakukan:

- ✓ Penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran.
- ✓ Mengarahkan penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran.

#### **2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja**

##### **2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya**

Target dan realisasi kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan informatika tahun 2014 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

No.	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi
<b>I</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>3.858.216.994,25</b>	<b>3.649.278.702,50</b>	<b>208.938.291,75</b>
1	Belanja Tidak Langsung	2.066.736.994,25	1.925.810.462,50	140.926.531,75
2	Belanja Pegawai	164.930.700,00	155.948.000,00	8.982.700,00
3	Belanja Barang	1.155.128.800,00	1.118.013.740,00	37.115.06000
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>471.420.500,00</b>	<b>449.506.500,00</b>	<b>21.914.000,00</b>
1	Belanja Gedung dan Bangunan			
2	Peralatan dan Mesin	471.420.500,00	449.506.500,00	21.914.000,00

Realisasi adalah sebesar Rp 3.649.278.702,50 atau 95 % yang disebabkan oleh adanya efisiensi/penghematan biaya baik belanja operasional maupun belanja modal, terutama belanja pegawai dan belanja barang termasuk didalamnya belanja perjalanan dan pemeliharaan.

### 2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya

Target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2014 sesuai dengan penetapan kinerja dan **indikator Kinerja Utama (IKU)** yang ditetapkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut.

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial Dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	Persentase seluruh desa di 8 kecamatan yang memiliki kelembagaan KIM yang informatif	78 (KIM) 100%	78 (KIM) 100%	100%	30.000.000	26.813.450	89,38

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang diberi pelatihan pengelolaan diseminasi informasi publik	78 KIM	68 KIM	87,18%			
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran Dan Dialog Publik	Persentase diseminasi informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar SPM :				180.000.000	177.306.100	98,50
		a. Dialog Interaktif Radio	15 kali	12 kali	125%			
		b. Seni Pertunjukan Rakyat	12 kali	6 kali	50%			
		c. Media interpersonal	12 kali	2 kali	16,67%			
		d. Media Luar Ruang	12 kali	21 kali	175%			
		Jumlah pengaduan informasi publik oleh masyarakat yang terakomodasi di website pemerintah yang ditindaklanjuti	9 pengaduan	9 pengaduan	100%			
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah SKPD yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	41 SKPD	41 SKPD	100%	25.000.000	24.108.400	96,43
		Jumlah SOP pengelolaan informasi publik yang diterbitkan	4 SOP	4 SOP	100%			
		Persentase SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang terukur sesuai dengan pedoman baku	9,76% (4 SKPD) dari 41 SKPD	-	0			

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah majalah diseminasi informasi yang tercetak dan disebarakan	225 eksemplar	225 eksemplar	100%	20.000.000	19.220.800	96,10
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah pengadaan hot spot sebagai media internet pada SKPD	1 unit	1 unit	100%	41.000.000	39.627.000	96,65
	Pemeliharaan dan pegelolaan website	Jumlah website sebagai sistem informasi pemerintah yang terpelihara	2 website	2 website	100%	79.000.000	76.074.600	96,30
		Persentase SKPD pemerintah daerah yang memiliki website informatif sesuai standar acuan baku	10 SKPD (24%)	10 SKPD (24%)	100%			
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah fasilitasi layanan internet kecamatan (PLIK)	20 kali	18 kali	90,0%	26.000.000	20.948.900	80,57
	Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	Jumlah radio pancar ulang (repeater) milik pemerintah yang terpelihara	3 unit	3 unit	100%	87.680.000	83.748.328	95,52
		Jumlah pengadaan HT untuk media komunikasi pemerintah daerah	6 HT	6 HT	100%			
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui electronic processing	59% (50 paket)	78% (133 paket dari total 170 paket pengadaan)	266%	451.800.000	437.491.700	96,83
Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi	Jumlah SDM yang dilatih IT	55 orang	53 orang	96,36%	34.000.000	29.532.800	86,86

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Dana		
						Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan Pos Dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	Jumlah penataan dan penertiban bangunan menara telekomunikasi	90 menara	90 menara	100%	50.000.000	48.153.800	96,31
		Jumlah penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	90 SKRD	90 SKRD	100%			
		Persentase penanganan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pembangunan menara telekomunikasi	0%	0%	0%			
		Persentase operator menara telekomunikasi yang membayar retribusi kepada pemerintah	83% (10 operator dari 12 operator )	83% (10 operator dari 12 operator )	100%			
	Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pemanfaatan pos perdesaan	25 orang	25 orang	100%	15.000.000	14.301.650	95,34

### Bab III

#### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan:

- ✓ Kualitas penyempurnaan manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif, dengan seluruh upaya, dana yang tersedia melalui APBD Kabupaten Karangasem maupun sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

##### 3.1.1 Perbandingan Realisasi antar Periode

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014 yang dibiayai APBD tahun 2014 dapat disimak dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Keuangan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2014

No.	Uraian	APBD	Realisasi APBD	Efisiensi
<b>I</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>3.858.216.994,25</b>	<b>3.649.278.702,50</b>	<b>208.938.291,75</b>
1	Belanja Tidak Langsung	2.066.736.994,25	1.925.810.462,50	140.926.531,75
2	Belanja Pegawai	164.930.700,00	155.948.000,00	8.982.700,00
3	Belanja Barang	1.155.128.800,00	1.118.013.740,00	37.115.06000
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>471.420.500,00</b>	<b>449.506.500,00</b>	<b>21.914.000,00</b>
1	Belanja Gedung dan Bangunan			
2	Peralatan dan Mesin	471.420.500,00	449.506.500,00	21.914.000,00

### **3.1.2 Hambatan dan Kendala pencapaian target**

Walaupun realisasi target kinerja sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun ada juga suatu kendala yang dihadapi. Beberapa kendala atau hambatan diantaranya:

- ✓ Sumber daya manusia yang belum optimal sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- ✓ Masih kurangnya jumlah personil yang ada.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yaitu:

- ✓ Mengoptimalkan personil yang ada dengan pembagian tugas yang merata dan memupuk kerjasama yang baik.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan yaitu:

- ✓ Mengikutkan pelatihan-pelatihan bagi pegawai sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik.

## **Bab IV**

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2014 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan SKPD**

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu **tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjumlahan** dan **tahap posting ke buku besar** setiap akun yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni pengguna anggaran dan pengguna barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Penggunaan anggaran dan penggunaan barang tersebut meliputi: Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Pos dan Telekomunikasi, dan Bidang Pengolahan Data Elektronik.

#### **4.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran**

Beberapa hal yang di pertimbangkan dalam penyusunan laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perrundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2. Kesenambungan entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak putus keberadaannya/berkesinambungan.

3. Pengukuran dalam rupiah, pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.
4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD SKPD. Pendapatan dan penerimaan biaya diakui pada saat diterima di kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran biaya diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah.
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan neraca. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas.
6. Asas Bruto. Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerima setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
7. Harga perolehan (*historical cost*), nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap ditempat dan siap digunakan.
8. Periode Akuntansi, informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
9. Dana Umum (kecuali aset), pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan dropping dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.

### **4.3 Kebijakan Akuntansi Pokok**

#### **4.3.1 Pendapatan**

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah .

2. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan.
3. Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima di kas daerah.
4. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

#### **4.3.2 Belanja**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
4. Belanja diakui dalam periode berjalan berdasarkan kas yang dikeluarkan dari kas daerah.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

6. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
7. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

#### **4.3.3 Pembiayaan**

1. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah.
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi).
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan.
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

#### 4.3.4 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan pada masa depan diharapkan manfaat ekonomi dan/atau sosial dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keluarga yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi **aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan**, dan aset lainnya.
  - A. Aset Lancar
    1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
    2. Aset lancar terdiri atas: **kas, piutang, persediaan**, dan lain-lain
    3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
    4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
    5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
    6. Piutang terdiri atas: **piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain**, dsb.
    7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.
    8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
    9. Persediaan terdiri atas: **bahan habis pakai kantor, obat-obatan**, dan lain-lain.
    10. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

## B. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
  - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan intrnasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk dana bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
5. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

## C. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
3. Aset tetap terdiri dari **Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya**.
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah

penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya.
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain sejenis.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harta gantinya.
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak pemilikannya berpindah.
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan.
15. Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan.

16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan.
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
19. Aset tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai tahun 2005, seiring dengan pemberlakuan PP No. 24 Tahun 2005, dengan memperhitungkan sisa umur ekonomis.

#### D. Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

#### E. Aset lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, kemitraan dengan pihak III, lain-lain.

3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

#### **4.3.5 Kewajiban**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.
9. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

10. Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang.
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang rupiah.

#### **4.3.6 Ekuitas Dana**

1. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
3. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang antara lain terdiri dari SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.
4. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang,
5. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yang ditanam dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan akun lawan dana cadangan.
6. Ekuitas dana lancar diakui ada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
7. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang.
8. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

#### 4.3.7 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan aset tetap yang masih 0 atau Rp.100 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam tahun 2014, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang didalam PP No. 24 Tahun 2005. Untuk memudahkan perhitungan tarip penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut :

Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat (tahun)	Masa Penyusutan
1. Peralatan dan mesin	5 - 12	8,33 - 20
a. Alat-alat besar	10	
b. Alat Angkut	10	
c. Alat bengkel dan alat ukur tidak bergerak	10	
d. Alat bengkel dan alat ukur bergerak	5	
e. Alat pertanian	5	
f. Alat kantor dan rumah tangga	5	
g. Alat studio dan alat komunikasi	5	
h. Alat-alat kedokteran tidak bergerak	10	
i. Alat-alat kedokteran bergerak	5	
j. Alat-alat laboratorium tidak bergerak	10	
k. Alat-alat laboratorium bergerak	5	
l. Alat-alat persenjataan keamanan logam	10	
m. Alat-alat persenjataan keamanan bukan logam	5	
2. Gedung dan Bangunan	25	4
3. Jalan, irigasi & jaringan	10- 20	5 - 10
4. Aset tetap lainnya	5	20

3. Dalam perhitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Mengingat

operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca pemerintah Kabupaten Karangasem.

4. Selanjutnya dalam perhitungan penyusutan dipertimbangkan penggunaan nilai residu aset tetap sebesar 10% dari nilai perolehan.

Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan tahun 2014 dihitung sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam tahun 2014 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat nilai residu yang disestimasikan.
6. Terhadap aset tetap yang telah digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akuntansi penyusutan) dalam neraca. Khusus perolehan tahun 2014, nilai yang dipisahkan adalah sebesar nilai perolehannya. Atas aset tetap tersebut tidak diberlakukan penyusutan.

**Bab V**  
**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

**5.1 Penjelasan Pos Belanja**

**5.1.1 Belanja Operasional**

Belanja operasional adalah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk kegiatan sehari-hari di Dinas Komunikasi dan Informatika yang member manfaat jangka pendek.

**A. Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.155.948.000,00 sesuai dengan anggaran belanja pegawai yang telah ditetapkan sebesar Rp.164.930.700,00 atau terealisasi 94,55%. Rincian belanja tersebut, per jenis kegiatan ada pada lampiran.

**B. Belanja Barang/Jasa**

Realisasi belanja barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.1.118.013.740,00 lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.155.128.800,00 atau terealisasi 96,79%. Rincian belanja tersebut, perjenis kegiatan, disajikan pada lampiran.

**C. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal tahun 2014 adalah sebesar Rp. 449.506,500,00 lebih rendah Rp. 471.420.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 95,35 % sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
1	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2	Peralatan dan mesin	471.420.500	449.506.500	21.914.000	95,35
Jumlah		471.420.500	449.506.500	21.914.000	95,35

Rincian lebih lanjut belanja tersebut, disajikan pada Lampiran.

## 5.2 Penjelasan Pos Aset

### 5.2.1 Aset Lancar

#### 5.2.1.1 Kas di Kas Daerah (SKPD)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2014 yang berada di Bank dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Rekening Kasda Dinas Komunikasi dan Informatika di BPD Cab Karangasem No. Rek-01.00.00634.8	0,00
Jumlah		0,00

#### 5.2.1.2 Kas di Kas SKPD

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah (saldo uang muka BUD) yang berada pada bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten per 31 Desember 2014.

### 5.2.2 Aset Tetap

Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola dan digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 2.295.071.930 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	263.680.000
2	Peralatan dan Mesin	1.860.216.930
3	Gedung dan Bangunan	171.175.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap lainnya	-
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.295.071.930</b>
	Akumulasi penyusutan	1.031.936.830
	<b>Jumlah</b>	<b>1.263.135.100</b>

**5.2.2.1 Tanah** **Rp 263.680.000**

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik per 31 Desember 2014.

**5.2.2.2 Peralatan dan Mesin** **Rp 1.860.216.930**

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2014 yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk kepentingan pemerintah dan pelayanan publik.

**5.2.2.3 Gedung dan Bangunan** **Rp 171.175.000**

Merupakan gedung dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2014 yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olahraga.

**5.2.2.4 Akumulasi Penyusutan** **Rp 1.031.936.830**

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis. Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan dalam Daftar Aset Tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD ini.

**5.2.3 Aset lainnya**

**5.2.3.1 Aset lain-lain** **Rp. 21.432.000,00**

Jumlah tersebut merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2014, dengan uraian sebagai berikut:

### 5.3 Penjelasan Pos Kewajiban

#### 5.3.1 Biaya Yang Masih Harus Dibayar/Dana Titipan **Rp 00**

Biaya yang masih harus dibayar/dana titipan merupakan Kewajiban Jangka Pendek SKPD dari sisa lebih anggaran pada Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2014.

### 5.4 Penjelasan Pos Ekuitas Dana **Rp. 2.295.071.930**

#### 5.4.1 Ekuitas Dana Investasi

##### 5.4.1.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap **Rp 2.295.071.930**

Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

##### 5.4.1.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya **Rp. 21.432.000**

Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, namun telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2014, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	-
2	Gedung dan Bangunan	-
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
4	Aset Tetap lainnya	21.432.000
	<b>Jumlah</b>	-

## **Bab VI**

### **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

#### **6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **6.1.1 Kedudukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 yang mengatur tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

**Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di  
Bidang Komunikasi dan Informatika**

##### **6.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 12 Kepala Seksi (Eselon IV). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
KARANGASEM  
BERDASARKAN PERDA  
NO. 7 TAHUN 2008



### 6.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- b. penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- d. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- e. pelaksanaan tugas dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6.1.4 Visi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan unit penunjang dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informatika. Mengacu pada Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati tersebut diatas, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

**Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika Menuju  
Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma**

#### **6.1.5 Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Untuk Mewujudkan Kualitas Diseminasi dan Layanan Informasi**
2. **Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Jaringan, Sistem Aplikasi, Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Serta Layanan Berbasis IT**
3. **Mengembangkan sarana dan prasarana layanan telekomunikasi yang bermanfaat bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat**

## **Bab VII**

### **Penutup**

#### **5.1 Simpulan**

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 disusun berdasarkan entitas akuntansi yang dilaksanakan sejalan dengan siklus akuntansi yaitu tahap identifikasi dokumen sumber, penjumlahan, dan tahap posting ke buku besar setiap akun. Dokumen sumber yang digunakan dalam pelaporan ini adalah dokumen yang ada pada buku kas sebagai pencatatan atas semua Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya dibuat dalam jurnal dan buku besar pada seluruh kegiatan. Di samping dokumen sumber yang ada pada buku besar, dalam pembuatan neraca SKPD juga menggunakan dokumen sumber berupa laporan aset tetap SKPD. Pada setiap akhir tahun anggaran, dibuatlah laporan keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LPPD).

Pada Tahun Anggaran 2014, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran keseluruhan sebesar 3.060.960.160,30 termasuk belanja tidak langsung sebesar 2.066.736.994,25 belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar 164.930.700,00 belanja barang/jasa sebesar 1.155.128.800,00 dan belanja modal 471.420.500. Dari seluruh anggaran tersebut, dapat direkapitulasi masing-masing terealisasi; belanja tidak langsung untuk pemenuhan gaji, tunjangan, dan lainnya sebesar 1.925.810.462,50 (96,79%), belanja pegawai pada belanja langsung sebesar 155.948.000,00 (94,55%), belanja barang/jasa sebesar 1.155.128.800,00 (96,79%), dan belanja modal sebesar 449.506.500,00 (95,35%). Secara akumulatif (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terealisasi sebesar 3.649.278.702,50 (94,58%)

Dibandingkan dengan tahun Anggaran sebelumnya (TA 2013), pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika naik 26,05%, hal ini disebabkan oleh bertambahnya anggaran pada belanja langsung. Untuk sumber anggaran, dalam tahun 2014 anggaran yang dikelola hanyalah APBD II saja, jadi tidak ada pengelolaan dana APBD I maupun APBN.

## 5.2 Saran

Dari keseluruhan pelaporan keuangan pada Tahun Anggaran 2014, dapat disarankan sebagai berikut.

- a. Realisasi anggaran haruslah dibarengi dengan peningkatan kinerja secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa jika tidak ada peningkatan kinerja, kemungkinan penyerapan anggaran tersebut akanlah sia-sia belaka. Fungsi laporan keuangan hendaklah disinkronisasikan dengan laporan peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisi yang lain.
- b. Pada saat ini, masalah yang sangat rentan pada pelaporan keuangan adalah menyangkut keberadaan aset daerah yang menjadi bagian dalam pelaporan keuangan. Penataan aset yang tidak baik dan bertanggungjawab hendaklah bisa dihindari sehingga laporan keuangan benar-benar dapat berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban pada setiap instansi dan unit kerja masing-masing.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NO.		URAIAN	REF	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	SISA ANGGARAN	( % )
I		PENDAPATAN					
	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0
	2	Pendapatan Retribusi Daerah		800.000.000	758.899.300,00	41.100.700	94,86
	3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0
	4	Lain - lain PAD yang sah		0,00	57.098.954	-57098954,00	0
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah		800.000.000,00	815.998.254,00	(15.998.254,00)	102,00
	2	PENDAPATAN TRANSFER					
	1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
	1	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0
	2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0
	3	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0
	3	Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0
	2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
	1	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0
	3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0
	2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		0,00	0,00	0,00	0
		Total Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00	0
	3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
	1	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0
	2	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Lain - Lain Pendapatan yang sah		0,00	0,00	0,00	0
		JUMLAH PENDAPATAN		800.000.000,00	815.998.254,00	(15.998.254,00)	102,00
II		BELANJA	5.1				
	1	BELANJA OPERASI	5.1.1				
	1	Belanja Pegawai	5.1.1.1	2.231.667.694,25	2.081.758.462,50	149.909.231,75	93,28
	2	Belanja Barang	5.1.1.2	1.155.128.800,00	1.118.013.740,00	37.115.060,00	96,79
	3	Bunga		0,00	0,00	0,00	0
	4	Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Belanja Operasi		3.386.796.494,25	3.199.772.202,50	187.024.291,75	94,48

	2	BELANJA MODAL	5.1.2				
	1	Belanja Tanah	5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0
	2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2	471.420.500,00	449.506.500,00	21.914.000,00	95,35
	3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0
	5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Belanja Modal		471.420.500,00	449.506.500,00	21.914.000,00	95,35
	3	BELANJA TAK TERDUGA				-	
	1	Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0
	4	TRANSFER				-	
		TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				-	
	1	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0
	2	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0
	3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa		0,00	0,00	0,00	0
				3.858.216.994,25	3.649.278.702,50	208.938.291,75	94,58
		SURPLUS / DEFISIT		3.058.216.994,25	2.890.379.402,50	167.837.591,75	94,51
III	1	PEMBIAYAAN					
	1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	1	Penggunaan SILPA		0,00	0,00	0,00	0
		Jumlah Penerimaan		0,00	0,00	0,00	0
	2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0
	2	Transfer ke Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0
	3	SURPLUS / DEFISIT		0,00	0,00	0,00	0
	4	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya					
		Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0
		PEMBIAYAAN NETO		0,00	0,00	0,00	0
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00	0

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
NERACA KONSOLIDASI  
PER 31 DESEMBER 2014

No.	Uraian	Ref	2013	2014
I.	ASET			
	1. ASET LANCAR	5.2.		
	1 Kas di Kas Daerah	5.2.1.1		
	1 Kas di Kas SKPD	5.2.1.2		0,00
	2 Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.3	-	0,00
	3 Piutang Pajak	5.2.1.4		0,00
	4 Piutang Retribusi	5.2.1.5		0,00
	5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.2.1.6		0,00
	6 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	5.2.1.7		0,00
	7 Piutang Lainnya	5.2.1.8		0,00
	8 Persediaan	5.2.1.9		0,00
	Jumlah Aset Lancar		-	0,00
	2. INVESTASI JANGKA PANJANG			
	1. Investasi Nonpermanen			
	1. Investasi Dalam Dana Bergulir			0,00
	2. Investasi Dalam Proyek Pembangunan			0,00
	Jumlah Investasi Nonpermanen		-	0,00
	2. Investasi Permanen			
	1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			0,00
	Jumlah Investasi Permanen		-	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		-	0,00
	3. ASET TETAP			
	1 Tanah	5.2.2.1	263.680.000	263.680.000
	2 Peralatan dan Mesin	5.2.2.2	1.459.489.680	1.860.216.930
	3 Gedung dan Bangunan	5.2.2.3	171.175.000	171.175.000
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	5 Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
	6 Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
	7 Akumulasi Penyusutan	5.2.2.4	827.086.096,80	1.031.936.830,00
	Jumlah Aset Tetap		1.844.505.430,00	2.273.639.930,00
	4. DANA CADANGAN			
	1 Dana Cadangan			0,00
	Jumlah Dana Cadangan		-	0,00
	5. ASET LAINNYA	5.2.3		
	1 Aset Lain-lain	5.2.3.1	49.839.250,00	21.432.000,00
	Jumlah Aset Lainnya		49.839.250,00	21.432.000,00
	JUMLAH ASET		1.894.344.680,00	2.295.071.930
II	KEWAJIBAN	5.3		
	1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.1	-	0,00
	2 Utang Muka BUD	5.3.2		0,00
	3 Pendapatan lainnya yang ditangguhkan	5.3.3		0,00
	4 Biaya lainnya yang masih harus dibayar/dana titipan	5.3.4		0,00
	5 Utang Bunga	5.3.5		0,00
	6 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	5.3.5		0,00
	7 Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6		0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	0,00
	2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	1 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		-	0,00
III	EKUITAS DANA			
	1. EKUITAS DANA LANCAR			
	1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)			0,00
	2 Cadangan Piutang			0,00
	3 Cadangan Persediaan			0,00

No.	Uraian	Ref	2013	2014
	4 Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		-	0,00
	<b>2. EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
	1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang			0,00
	2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.4.1.1	1.844.505.430,00	2.273.639.930
	3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	5.4.1.2	49.839.250,00	21.432.000,00
	4 Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang			0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.894.344.680,00	2.295.071.930,00
	<b>3. EKUITAS DANA CADANGAN</b>			
	1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan			0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		-	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		1.894.344.680,00	2.295.071.930
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		1.894.344.680,00	2.295.071.930

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan

Daftar Aset s/d Desember 2014

No	Uraian	Jumlah
1	Tanah	263.680.000
2	Peralatan dan Mesin	1.301.098.930
3	Gedung dan Bangunan	171.175.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap lainnya	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.735.953.930</b>
	Akumulasi penyusutan	1.094.416.990,00
	<b>Jumlah</b>	<b>641.536.940</b>